



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
Tahun 2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (LKJIP) Tahun 2020 Kota Balikpapan. Adapun tujuan penyajian Lapoan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kominfo Kota Balikpapan.

Penyusunan LKJIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

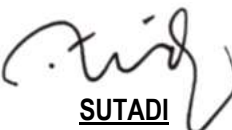
Namun Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Tahun 2020, sehingga perlunya saran maupun masukan yang bersifat perbaikan dalam penyempurnaan laporan ini serta perbaikan kinerja Diskominfo tahun kedepannya.

Kami yakin kedepannya dengan kinerja yang lebih baik lagi akan mampu mewujudkan seluruh aspirasi berbagai pihak maupun stakeholder di Kota Balikpapan dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan, referensi dan informasi mengenai hasil kinerja Diskominfo Kota Balikpapan pada Tahun 2020.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan menyelesaikan penyusunan LJKIP Tahun 2020. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memerlukan.

Balikpapan, 31 Maret 2021

KEPALA DINAS



SUTADI

Ringkasan Eksekutif

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan No : 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tersebut , penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang statistik, urusan Pemerintahan dibidang persandian dan perumusan kebijakan dibidang telekomunikasi dan LPSE serta pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi , pengembangan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi, pengembangan tehnologi, informasi dan komunikasi dan pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi, bina e-Government serta LPSE.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi, pengembangan tehnologi, informasi dan komunikasi, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada program prioritas daerah yang mengacu pada Renstra 2016-2021, dalam pengukuran sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 yaitu ***“Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik dan Meningkatnya penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah terhadap masyarakat”***.

Dimana keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/ stakeholders (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah , dinas/instansi terkait) serta masyarakat di Kota Balikpapan termasuk tentunya yang pasti dukungan penuh dari segenap komponen internal Diskominfo Kota Balikpapan.

Berikut uraian dan status capaian dari kedua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat	77,5	86,56	112 (tercapai)
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	98%	98%	100% (tercapai)

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada TA 2020 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Target Retribusi 2020	Realisasi Tahun 2020	Prosentase Realisasi
1	Pendapatan-LRA	687.516.000	907.521.120	132%
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	687.516.000	907.521.120	132%
2	Belanja	11.087.250.900	9.948.250.408	89,73%
2.1	Belanja Operasi	9.942.125.900	8.868.563.908	89,20%
2.2	Belanja Modal	1.145.125.000	1.079.686.500	94,29%

Secara umum kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kominfo telah berjalan dengan cukup baik, dengan prosentase realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar 132% dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 baik belanja operasional dan belanja modal sebesar 89,73%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtiar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
2. Tugas dan Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia	5
5. Aspek Strategis Organisasi	8
6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
Bab II Perencanaan Kinerja	12
1. Perencanaan Strategis	12
2. Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
1. Capaian Kinerja	21
2. Realisasi Anggaran	44
3. Capaian Prestasi dan Penghargaan	52
Bab IV Penutup	52
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4	Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	6
Tabel 2.1	Kesesuaian Renstra dengan RPJMD	13
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	16
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 3.3	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan SKM Layanan Informasi Publik Diskominfo Pada Tahun 2020	26
Tabel 3.4	Tabel daftar Aplikasi yang diinginkan dan daftar aplikasi yang tersedia	28
Tabel 3.5	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada dinas komunikasi dan informatika kota balikpapan tahun anggaran 2020	39
Tabel 3.6	Tabel perbandingan target dan realisasi APBD TA.2020 Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai sasaran strategis	47
Tabel 3.7	Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2020	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	4
Gambar 1.2	Rincian Pegawai Berdasarkan Esselon	6
Gambar 1.3	Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Gambar 1.4	Rincian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 2.1	Program Prioritas dan program Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika	17
Gambar 2.2	Alur Penyusunan Perjanjian Kinerja Diskominfo	18
Gambar 3.1	Perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU 1	27
Gambar 3.2	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU 2	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan TIK dan pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi, Bina Egovernment serta LPSE;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan TIK, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Eselon IV di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian tersebut tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, maka ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Walikota dengan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV. Laporan Kinerja ini disusun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020, dan laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja Dinas komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang- undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, laporan ini digunakan dengan mempratekkan prinsip – prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

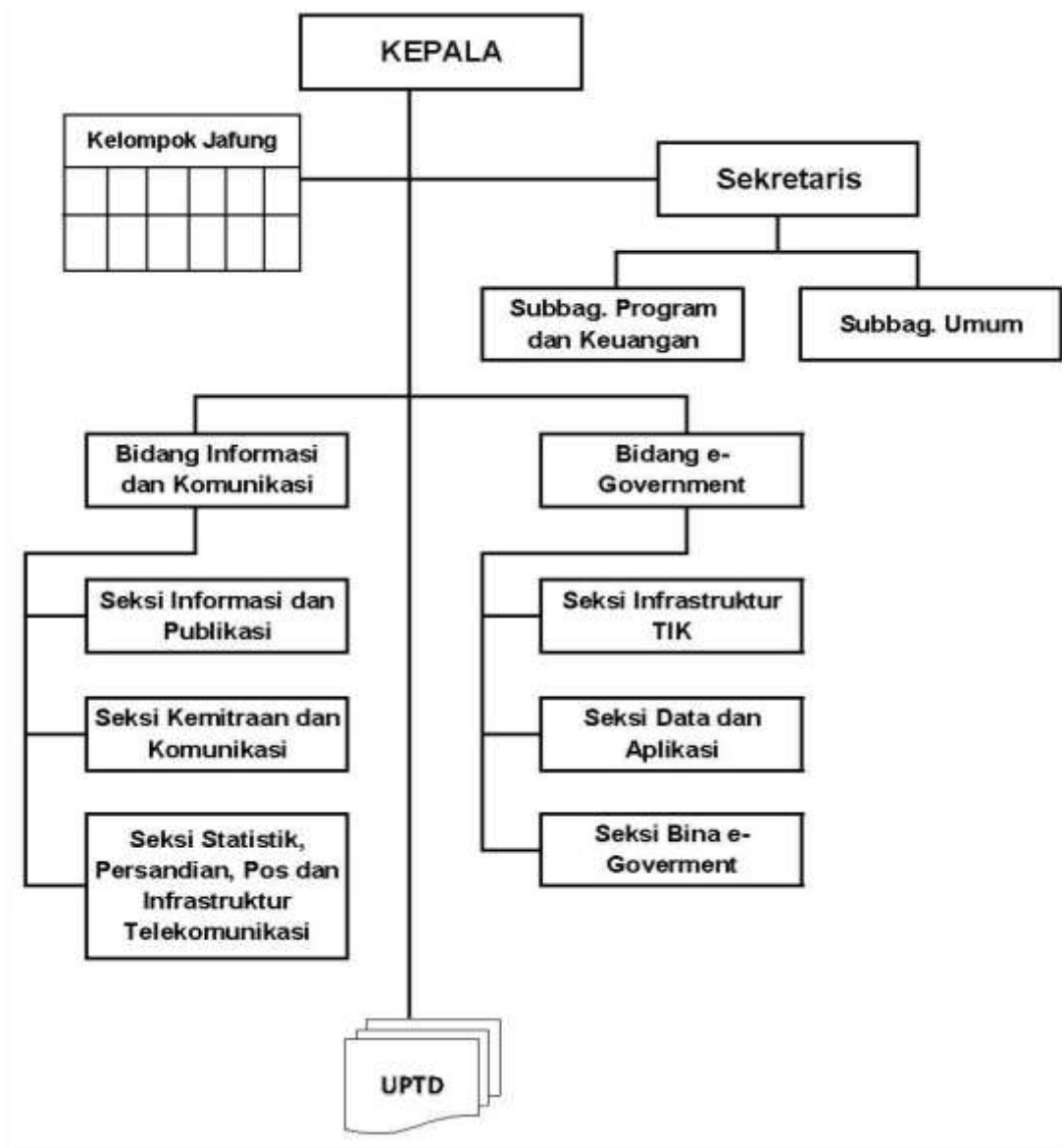
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2020.

1.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Potensi Sumber Daya

1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas komunikasi dan informatika



Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang membawahi
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum;

- c. Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Komunikasi; dan
 - 3. Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi;
- d. Bidang e-Government, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Data dan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Bina e-Government;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Kantor Walikota Balikpapan, Jl. Jend. Sudirman No. 1 – RT 13 Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, untuk bidang e-Government dan gedung Dinas komunikasi dan Informatika Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu Balikpapan (Samping Kantor BPS) untuk bidang Infokom dan Sekretariat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 35 orang. Berikut rincian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan:

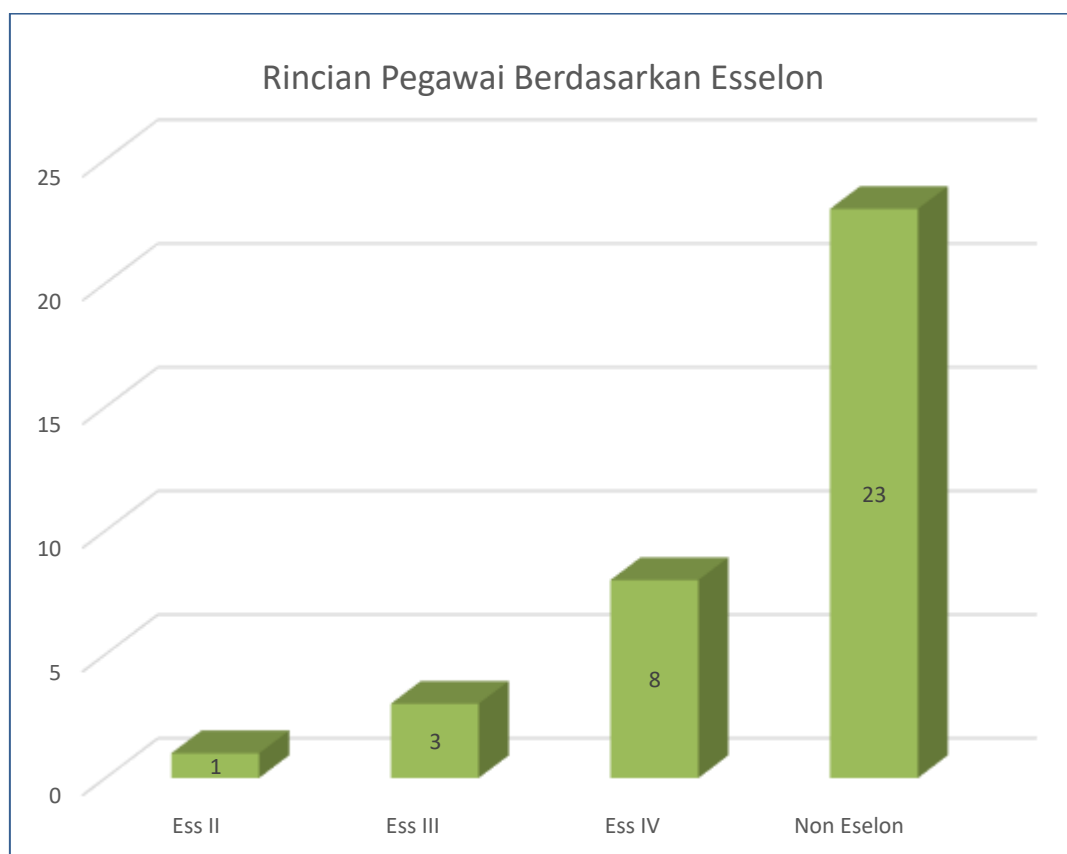
Tabel 1.4

Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

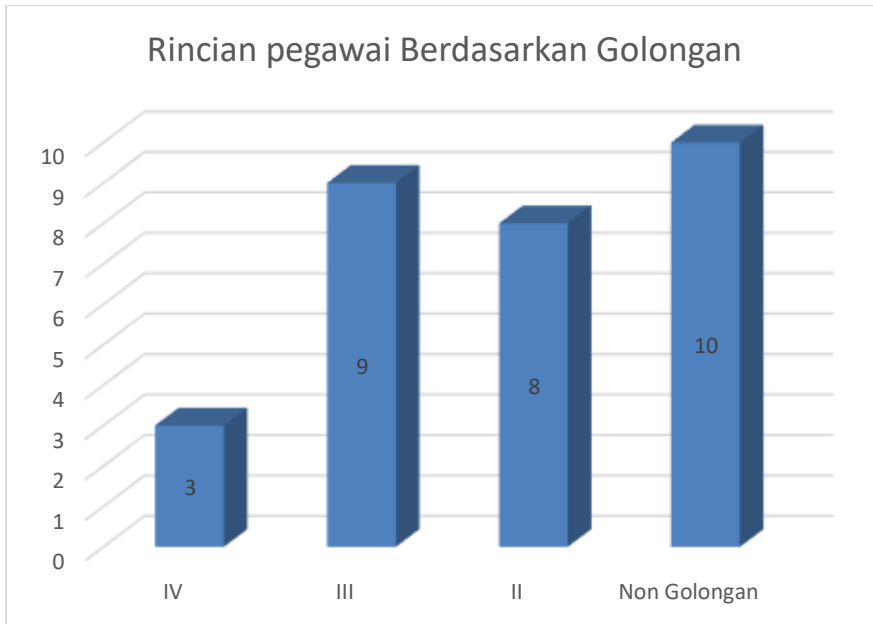
No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Naban	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	1	0	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	0	2	0	1	1	0	0	0	2
4	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	2	0	0	0	2
5	Kepala Seksi	0	0	5	0	5	0	0	0	5
6	Pelaksana					4	7		19	30
Total										41

Gambar 1.2

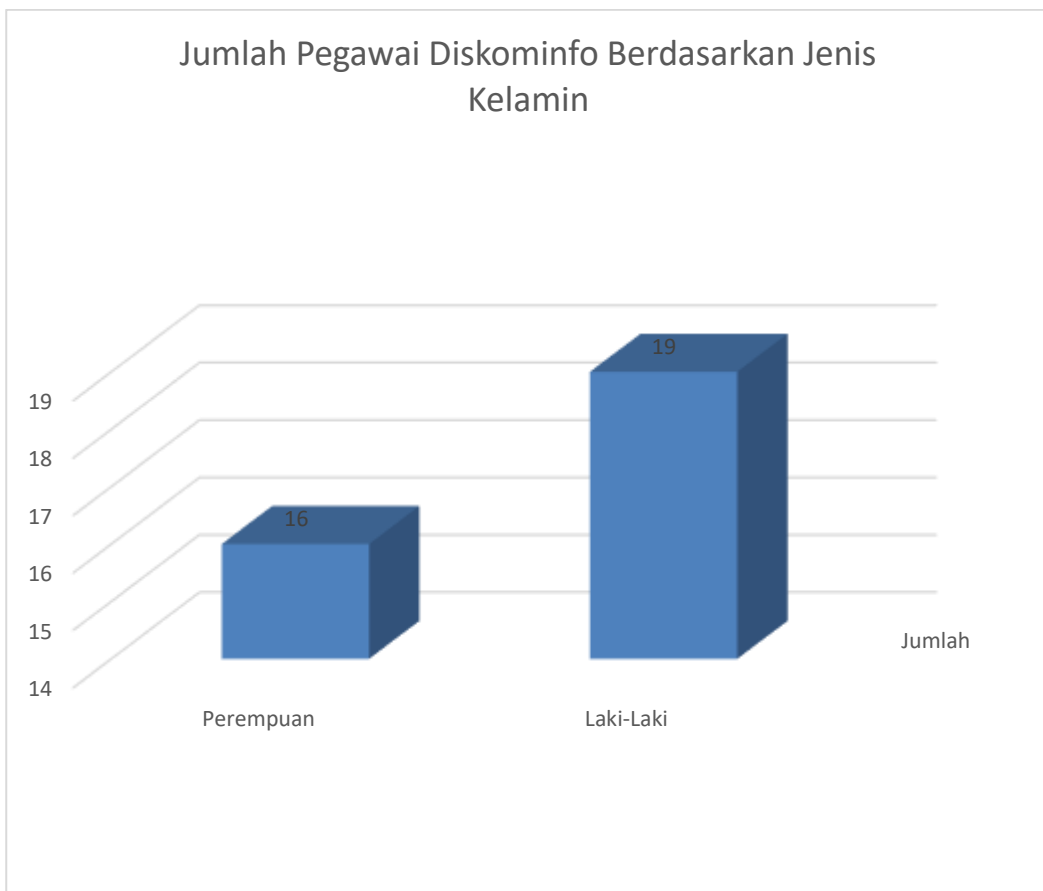
Rincian Pegawai Berdasarkan Esselon



Gambar 1.3
Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1.4
Rincian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



1.5 Permasalahan Strategis

1.5.1 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 2 (dua) permasalahan utama yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah. Kedua permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit pelayanan publik yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyebarluasan informasi publik. Dimana pelayanan penyebarluasan informasi yang diselenggarakan oleh Diskominfo ini antara lain pelayanan permohonan informasi yang diselenggarakan oleh Diskominfo sebagai PPID Kota Balikpapan. Penyebarluasan informasi melalui media sosial, media luar ruangan (siaran keliling) , media massa, surat kabar, Televisi, radia serta pengaduan masyarakat.
2. Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung Balikpapan Cyber City.

E Government adalah penggunaan teknologi oleh Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menghubungi masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan lain yang terkait. Teknologi ini dapat menghasilkan berbagai pelayanan publik dengan berbagai manfaat, penyampaian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi antara pelaku bisnis dan dunia industri, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan akses informasi publik.

Saat ini pelaksanaan e –Government masih menghadapi permasalahan terkait perencanaan, kebijakan , kelembagaan, aplikasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, Layanan dan anggaran TIK.

Permasalahan tersebut berusaha di atasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menerbitkan cetak biru *e Government* Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebagai panduan implementasi *e-Government*. Cetak biru tersebut

mengamanatkan transformasi perubahan *e-Government* menuju *Smart Governance*. Transformasi tersebut dituangkan dalam *roadmap* pengembangan *smart Governance* dengan fokus pada pengembangan sistem informasi manajemen perangkat daerah dan infrastruktur TIK terpadu, penyusunan kebijakan TIK dan integrasi data serta pengembangan layanan berbasis aplikasi *mobile* dan Sistem Informasi Eksekutif.

3. Peningkatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian keterbukaan informasi.

Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi (95%), internet (33%), radio (20%), koran (12%), dan media lainnya (22%). Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar dari mereka memiliki akses terhadap televisi dan telepon selular namun demikian, televisi dan telepon selular yang mereka miliki tidak dapat mengakses informasi mengenai program prioritas terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya dibutuhkan. Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat.

Diharapkan dengan memberikan pelayanan informasi sesuai ketentuan Undang-undang no. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik kepada masyarakat, dapat diperoleh kepuasan masyarakat dalam hal informasi pembangunan secara menyeluruh.

1.5.2 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Statistik

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang urusan adalah adalah:

1. Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, valid dan komprehensif perlu ditingkatkan.

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Saat ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia kegiatan statistik hanya dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan data statistik sektoral saja yang ada di beberapa perangkat daerah. Untuk itu tahun 2019 – 2020 perlu segera disusun tata kelola satu data statistik sektoral sehingga pengumpulan dan penyebaran data/informasi dapat berjalan dengan baik.

1.5.3 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Persandian

Dalam Dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, tidak terdapat permasalahan strategis dikarenakan pada tahun 2017 penyelenggaraan kegiatan persandian masih dilaksanakan pada tataran kirim terima berita melalui mail.sanapati.net yang dilaksanakan pada bagian umum setdakot Balikpapan. Sedangkan pada Tahun 2017 telah berdiri Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan dalam urusan Persandian. Saat ini penyelenggaraan kegiatan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada pengamanan informasi. Pengamanan informasi harus mampu memberikan pengamanan terhadap penggunaan teknologi terkini dan masa mendatang. Agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun kebijakan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.

Namun, saat ini tata kelola tersebut belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia pada seksi persandian dan urgensi kegiatan pengamanan informasi yang harus terlebih dahulu dilaksanakan, sehingga pada tahun 2019 – 2020 akan menjadi prioritas urusan persandian dalam menyusun tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran, untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2020 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tentang Indikator Kinerja Utama.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 sampai dengan 2021

Penyusunan Renstra 2016-2021 dilakukan dengan menyelaraskan masalah strategis yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dibutuhkan kebijakan yang dapat menghadapi berbagai masalah strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

Arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di Kota Balikpapan yang tinggi di satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika agar mampu menuangkan kebijakan yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat yang sangat dinamis ke dalam Renstra Dinas Komunikasi dan informatika.

Pemerintah Kota Balikpapan Dalam konteks ini Dinas Komunikasi dan informatika merumuskan visi

“ Mewujudkan Balikpapan Smart Governance”

Smart Governance adalah gambaran pelayanan publik masa kini yang berorientasi pada efisiensi, pada kebutuhan masyarakat, tidak terbatas ruang dan mengedepankan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. **Smart governance** dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa *smart* pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya. **Smart**

governance memanfaatkan teknologi Informasi Komunikasi yang ada untuk memfasilitasi dan mendukung perencanaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.. Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memformulasikan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Membangun Keterbukaan Informasi
2. Memperkuat dan mengembangkan penerapan *e Government* melalui *e Governance*

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Tabel 2.1 Kesesuaian Renstra dengan RPJMD

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
Visi	Mewujudkan Balikpapan Kota Terkemuka, Nyaman dihuni , dan Berkelanjutan menuju Madinatul iman	Mewujudkan Balikpapan Smart Governance
Misi	Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik 2. Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance
Tujuan	Tujuan 8. Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasisTIK
Sasaran	Sasaran 10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik. 2. Meningkatnya penyelenggaraan

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
		Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat
Strategi dan Arah Kebijakan	<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan, 2. Pengelolaan aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional informasi melalui: Pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi para stakeholders terkait implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota melalui: <ul style="list-style-type: none"> menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media 2. Menyediakan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e government melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengelolaan e- government (tata kelola, regulasi) • Pengembangan dan pembangunan aplikasi • Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (jaringan, perangkat keras)
Program Pembangunan Daerah	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
Program Prioritas	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	Tahun 2017-2021 .Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD
Program Pendukung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi dengan indikator persentase cakupan pengawasan infrastruktur telekomunikasi 2. Program kerjasama Informasi dan Media Massa (tahun 2017- 2021) dengan indikator Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah 3. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat (2018-2021) dengan indikator Presentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat. 4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan indicator Persentase Publikasi data dan statistik daerah 5. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir periode perencanaan (tahun 2021).

Penentuan besaran sasaran strategis ditetapkan berdasarkan harapan *stakeholders*, kondisi internal maupun eksternal penetapan besaran strategis dihasilkan dari rapat koordinasi jajaran eselon II,III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	65,5	70,5	73,5	77,5	81,25
	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	84%	91%	95%	98%	100%

Sasaran Strategis diatas akan dicapai melalui 5 program .Adapun ke 5 Program tersebut adalah:

1. Program Pengawasan, pengendalian, Pembinaan telekomunikasi dan teknologi Informasi
2. Program Kerjasama informasi dan Media Masa
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Gambar 2.1

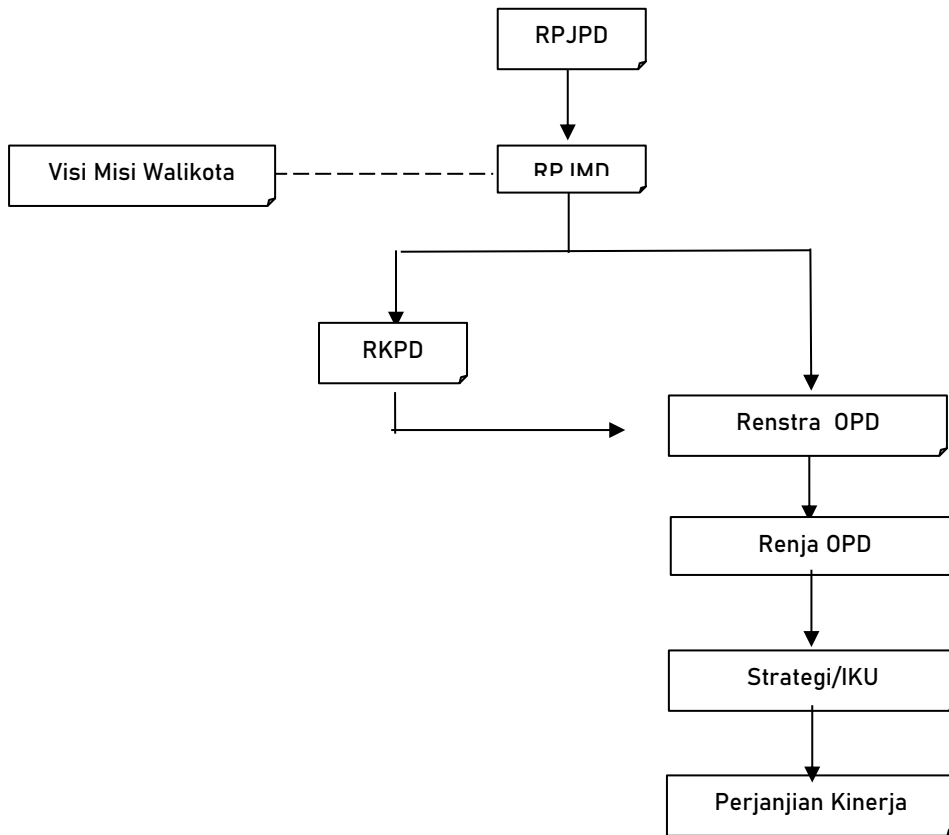
Program Prioritas dan program Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Gambar 2.2
Alur Penyusunan Perjanjian Kinerja Diskominfo



Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 diuraikan seperti pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2020
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik.	Skor Hasil Nilai Kepuasan Masyarakat	77.5
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	98%

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 diimplementasikan melalui 1 (satu) program prioritas dan 3(tiga) program pendukung seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Program Prioritas)

Tujuan dari Program Prioritas ini adalah mengoptimalkan teknologi informasi Komunikasi sebagai pendukung penerapan e government dalam rangka pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat Kota Balikpapan. Program-program ini antara lain :

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi (Program Pendukung)

Tujuan dari program ini adalah untuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi agar pelayanan publik terkait dapat dilaksanakan secara maksimal Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Pembinaan Pos dan Telekomunikasi

3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa (Program Pendukung)

Tujuan dari program ini adalah menyebarluaskan informasi kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan agar masyarakat memiliki informasi yang berimbang tentang Pemerintah Kota Balikpapan mengingat banyak terjadi hoax saat ini. Program Ini juga merupakan perwujudan peran Dinas Komunikasi dan informatika sebgai GPR. Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut

- a. Diseminasi Informasi Daerah
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa

4. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Program Pendukung)

Tujuan dari program ini adalah mengoptimalkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat Kota Balikpapan

Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK
 - b. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi
 - c. Monitoring Isu Publik
5. Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi (Program Pendukung)

Tujuan program ini adalah upaya pemerintah kota balikpapan dalam melindungi informasi publik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan;

- a. Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota
6. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah (Program Pendukung)

Tujuan program ini adalah Tersedianya data / informasi yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

- a. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tingkat capaian kinerja sasaran dalam hal ini diukur dengan menggunakan standar pengukuran ordinal

$$\text{CAPAIAN IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Standar pengukuran ordinal

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Sangat Baik
3	70-84	Baik
2	55-69	Cukup Baik
1	Kurang dari 55	Kurang

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis. Adapun kedua sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2020
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Nilai Kepuasan Masyarakat	77,5
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	98,00 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.450.000.000	APBD MURNI 2020
Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	1.275.000.000	APBD MURNI 2020
Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Tehnologi Informasi	169.895.000	APBD MURNI 2020
Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	727.500.000	APBD MURNI 2020
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	84.700.000	APBD MURNI 2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.254.109.500	APBD MURNI 2020
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	539.275.000	APBD MURNI 2020
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.200.000	APBD MURNI 2020
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275.000.000	APBD MURNI 2020

3.1.1 . PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2020 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Misi I				
Membangun Keterbukaan Informasi				
Tujuan				
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasisTIK				
Sasaran				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat	77,5	86.56	112%
Misi II				
Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance				
Tujuan				
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasisTIK				
Sasaran				
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e-government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e-government pada perangkat daerah	98%	138%	141%

Sebagai institusi yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha mengembangkan pengelolaan komunikasi publik yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi publik di Pemerintah Kota Balikpapan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, program dan kegiatan tersebut ditetapkan dengan indikator Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

1. Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik terdapat indikator sasaran **skor hasil kepuasan masyarakat** yang pada awal tahun 2020 memiliki target 77,5 kemudian realisasi skor yang tercapai di Tahun 2020 memiliki skor 78,50 (baik) sehingga capaian kinerja 101%.

Adapun skor rata-rata unsur hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan Publik} \times 25$$

Untuk Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan digambarkan dalam tabel berikut ini.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Teknik analisis data dalam pelaksanaan SKM layanan informasi publik Tahun 2020 adalah dengan menggunakan Analisa Univariat. Analisa ini bertujuan untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan) hasil temuan tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik tahun 2020 menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi publik tahun 2020 yang dilaksanakan Diskominfo berada pada kategori **sangat baik** dengan nilai IKM sebesar **86,56**.

Baiknya mutu layanan informasi publik tahun 2020 ditunjang oleh tingginya nilai rata-rata 5 dari 6 unsur tertimbang, yaitu kemudahan persyaratan, ketepatan waktu, kemampuan petugas, perilaku petugas, dan kualitas sarana dan prasarana.

Tabel 3.3
Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan
SKM Layanan Informasi PubIPik Diskominfo Pada Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,515
2.	Prosedur Pelayanan	3,595
3.	Kecepatan Pelayanan	3,435
4.	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3,560
5.	Keseuaian Pelayanan	3,545
6.	Kopentensi Petugas	3,555
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,395
8.	Penanganan Pengaduan	3,100
9.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0

Berdasarkan tabel diatas, unsur tertinggi dalam penilaian berada pada unsur Prosedur Pelayanan dengan nilai 3.395 Tingginya unsur ini menjadi acuan Diskominfo untuk mempertahankan nilai ini dengan selalu memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana layanan informasi publik. Sedangkan unsur terendah dalam penilaian ini berada pada unsur Penanganan Pengaduan dengan nilai 3,100 atau dengan kriteria kurang baik.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian terhadap hasil SKM layanan informasi publik tahun 2020 adalah rendahnya nilai pada unsur Penanganan Pengaduan. Padahal dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Diskominfo melaksanakannya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional. Adapun standar layanan yang digunakan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam standar pelayanan tersebut diuraikan prosedur pelayanan informasi yang harus dilakukan oleh badan publik, seperti mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi formulir dan menyerahkan salinan identitas diri yang menyatakan bahwa pemohon informasi

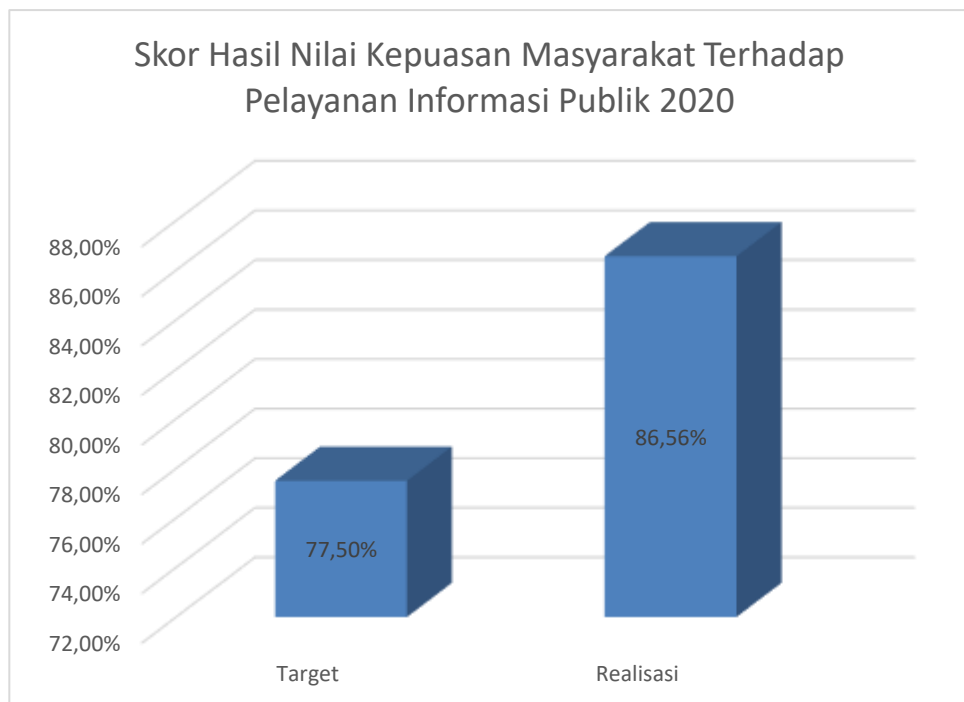
berkewarganegaraan Indonesia. Atas dasar itulah Diskominfo belum dapat melakukan perubahan standar pelayanan khususnya pada prosedur pelayanan sebelum adanya perubahan standar layanan informasi publik yang ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan perhitungan nilai IKM Layanan Informasi Publik Tahun 2020, maka saran yang dapat diberikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan informasi publik adalah dengan mempertahankan capaian nilai rata-rata per unsur pelayanan yang telah bernilai sangat baik dengan meningkatkan kualitas SDM pada layanan informasi publik.

Gambar 3.1

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU

Skor hasil nilai kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Informasi Publik



2. Pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat terdapat indikator sasaran **Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah.** Target sasaran ke 2 (dua) pada awal tahun disusun sebesar 98%, kemudian di akhir tahun 2020 Realisasi indikator kinerja yang diperoleh sebesar 138% dan mendapat capaian sebesar 141% dari target yang telah ditentukan. Indikator kinerja Persentase pemanfaatan SPBE atau *e government* pada perangkat daerah memiliki formulasi

jumlah aplikasi yang dimanfaatkan berbanding dengan jumlah aplikasi yang ada pada Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah Aplikasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 55 Aplikasi. Dan di tahun 2020, terealisasi 8 aplikasi yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sehingga total aplikasi yang sudah dimanfaatkan sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 77 aplikasi. Adapun daftar aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tabel daftar Aplikasi yang diinginkan dan daftar aplikasi yang tersedia

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi yang Sudah Ada		Aplikasi yang dibuat Tahun 2020	
1	BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur	3	1	e-presensi		
				2	tamisu		
				3	KGB		
				4	BAPERJAKAT		
2	BPKD	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2	1	SIPKD		
				2	SIMDA		
				3	Integrasi e-Planning		
3	BPPDRD	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7	1	SIMPAD		
				2	SISMIOP		
				3	vTax PBB		
				4	vTax SIG		
				5	Mobile POS		
				6	Metabase		
4	BAPPEDA	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1	Sistem Informasi Data Spasial		
				2	e-Planning		
				3	Database Pembangunan		
				4	SIPEKA		
				5	e-LKPJ		

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi yang Sudah Ada		Aplikasi yang dibuat Tahun 2020	
5	DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK)	1	WaCAT (Wargaku ke capil, aku tau) web.capilbalikpapan.com/
				2	KTP-elektronik	1	SPAK (Sistem Antrian Online Perekaman KTP Elektronik)
				3	Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan (Administrasi Layanan Surat Untuk Masyarakat)		
				4	Sistem Informasi Pelayanan Kelurahan (SIMYANKEL) - Administrasi Layanan Surat Untuk Masyarakat		
6	DINKES	Dinas Kesehatan	2	1	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)		
				2	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD)		
				3	Antrian Online RSUD		
7	DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	1	E-kinerja	1	Donasi
						1	Pelayanan Kelurahan Online (yankel)

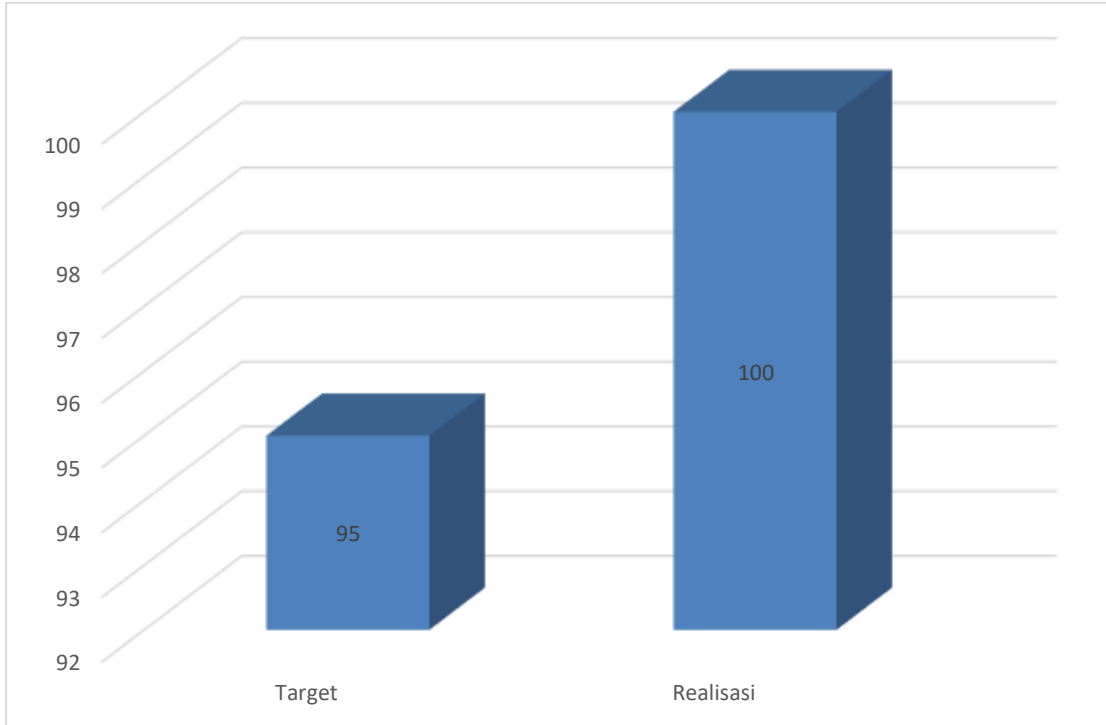
No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi yang Sudah Ada		Aplikasi yang dibuat Tahun 2020	
						1	portal pegawai (berelok)
						1	perjalanan dinas
						1	Retribusi rusunawa
				2	Beasiswa		
				3	Integrasi SIMPAD		
				4	SITANGGAP		
				5	eOffice		
				6	e-LHP		
				7	e-SKP		
				8	e-LP2P		
				9	Dashboard Kota		
8	DISKOP	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	1	1	Simdata Industri		
9	DP3	Dinas Pekejaan Umum	2	1	Data Informasi Pangan Pertanian dan Perikanan (DIPANGAN)		
10	DIPORAPAR	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	1	SIDIA (Sitem Informasi Data Indulk Atlet)		
				2	Antrian Online		
				3	SIPAN (Sistem Informasi Pemuda Balikpapan)		

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi yang Sudah Ada		Aplikasi yang dibuat Tahun 2020	
11	DPMPT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	3	1	Sistem Informasi Cerdas Layanan Untuk Publik (SiCantik)		
				2	Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP)		
12	DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	1	SiDalah (Sistem Informasi Data Sekolah) http://sidalah.balikipapan.go.id		
				2	PPDB Online (https://balikpapan.siap-ppdb.com/)		
13	DISHUB	Dinas Perhubungan	3	1	SIM-PKB (Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor)		
				2	SIMAU (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum)		
				3	TMC Kota Balikpapan		
14	DISPUSAR	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	1	MySipisis		
				2	e-Balikpapan		

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi yang Sudah Ada		Aplikasi yang dibuat Tahun 2020	
				3	eduTube		
				4	Inlist Lite		
				5	SIKD		
				6	Survey Kepuasan Pemustaka		
15	DPPR	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1	1	SIM IMTN (Pelayanan Ijin Mengolah Tanah Negara)		
16	DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja	2	1	Sistem Informasi Tenaga Kerja (Pendataan Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan)		
				2	Sim Hubungan Industrial		
				3	Siska		
17	Inspektorat		1				
18	SETDA	Sekretariat Daerah	1	1	SIM Bansos		
				2	JDIH		
				3	Informasi Coffee Morning (ICON)		
				4	Penggajian		
				5	SPPD		
				6	Kendaraan Dinas		

No	OPD		Jumlah	Nama Aplikasi yang Sudah Ada		Aplikasi yang dibuat Tahun 2020	
				7	SIMONTeppa		
				8	SIMPRA		
19	DISDAG			1	SIM Pasar		
20	DPU	Dinas Pekerjaan Umum		1	SIABANG GP		
21	DINSOS	Dinas Sosial		1	PMKS		
22	DLH	Dinas Lingkungan Hidup					
23	BPBD	Badan Penanggulangan Bencana				1	Warning Receiver System Ina TEWS
	Total Aplikasi di Tahun 2016		35				
	Target Aplikasi yang Diinginkan s.d. Tahun 2020		55				
	Total Aplikasi yang Sudah Dibangun s.d. Tahun 2020		77				

Gambar 3.2
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU
Pemanfaatan SPBE atau e *government* pada Pemerintah Kota Balikpapan



Hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya SDM bidang TIK dalam pelaksanaan pengintegrasian sistem aplikasi. Oleh karena itu solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan merekrut tenaga ahli dibidang TIK (Programmer) diluar ASN dan melakukan *transfer knowledge* kepada SDM TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

3.1.2. REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2020 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I

Terjadi kenaikan nilai realisasi sasaran I pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 78,30 menjadi 86,56 %

Terjadi kenaikan realisasi sebesar 19.74 %

b. Sasaran II

Terjadi kenaikan angka realisasi sasaran II jika dibandingkan dengan tahun 2020 Jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 100% menjadi 98%. Terjadi penurunan 20%.

INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2020	Realisasi	
		Tahun 2019	Tahun 2020
Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	77.5	78.80	86.56
Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	98%	100%	98%

3.1.3 REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN DENGAN TARGET AKHIR PERENCANAAN STRATEGIS DISKOMINFO

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2020 dengan target akhir Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Rencana Target 2021
		Target	Realisasi	capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5	86.56	112%	81,25
Meningkatnya penyelenggaraan (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	98%	98%	100%	100%

pemerintah terhadap masyarakat					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 disajikan sebagai berikut;

a. Sasaran I

Pengukuran capaian realisasi dari sasaran I, yaitu 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik', saat ini menggunakan indikator 'Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat'. Berdasarkan perbandingan angka realisasi tahun 2020 ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan nilai target dan realisasi. Kenaikkan nilai ini serta merta menggambarkan telah terjadi kenaikan kinerja. Kenaikkan nilai realisasi tersebut dikarenakan adanya perbedaan layanan informasi publik yang di survey. Pada tahun 2020, survey dilakukan terhadap pelayanan informasi aduan masyarakat lalu pada tahun 2020, survey dilakukan terhadap pelayan informasi dan dokumentasi (PPID). Perubahan objek yang disurvey tanpa merubah indikator kinerja sasaran dalam Renstra Diskominfo ini dilakukan karena PPID lebih tepat menggambarkan kualitas pelayanan informasi publik atau lebih luas jika dibandingkan dengan informasi pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Perbedaan objek survey juga membuat terjadinya perubahan metodologi pengambilan sampel dan juga metodologi penilaian hasil survey.. Kedepannya diharapkan hasil nilai survey akan terus meningkat bersamaan dengan ditingkatkannya kinerja dan peningkatan kompetensi SDM Diskominfo.

b. Sasaran II

Pengukuran capaian realisasi dari sasaran ke-2, yaitu 'Meningkatnya Penyelenggaraan (SPBE) Atau E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Terhadap Masyarakat', saat ini menggunakan indikator 'Persentase Pemanfaatan SPBE Atau E Government Pada Perangkat Daerah' dimana yang diukur adalah banyaknya jumlah aplikasi yang berhasil dikembangkan pada tiap tahun berjalan. Pada tahun 2020 capaian realisasi sasaran telah mencapai 98% dimana target capaian sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2020 capaian realisasi kinerja sebesar 98% . Terjadinya penurunan capaian realisasi ini bukan merupakan penurunan kinerja, karena secara target pada tahun 2020 adalah sebesar 98%.

Faktor utama dari melebihinya realisasi capaian dari target adalah :

1. Sistem pengelolaan TIK, dalam hal ini hanya di kelola *e-governance*, dimana masing-masing Perangkat Daerah tidak lagi bisa menganggarkan pembuatan dan pengelolaan aplikasi sendiri.
2. Pengembangan aplikasi di masing-masing Perangkat Daerah diharapkan mengikuti *blueprint* aplikasi *e-government*.
3. Kedua faktor di atas menyebabkan kegiatan pengembangan aplikasi di tiap Perangkat Daerah akan dan dapat dikontrol oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri di awal tahun 2019 telah menyebarkan formulir daftar aplikasi dan rencana pengembangan aplikasi di tahun berjalan, namun tidak setiap Perangkat Daerah memberikan data yang diinginkan. Hal ini menyebabkan kegiatan monitoring aplikasi menjadi sulit dan evaluasi antara capaian dengan rencana pengembangan aplikasi di tahun berjalan menjadi tidak tepat.

3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020. Berdasarkan pagu definitif TA 2020, anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp 11.087.250.900,00 dengan realisasi mencapai Rp 9.948.250.408,00 atau

90% dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2020 sebesar 90%. Atau terjadi penurunan anggaran sebesar 82%, akibat refocusing.

Tabel 3.5
TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan informasi Publik	77,5	86.56	112%	Program Pengawasan Penedalialan Telekomunikasi dan Tehnologi Informas	112.717.500	107.827.329	96		
						Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	112.717.500	107.827.329	96		
						Program kerjasama Informasi dan Media Massa	976.229.000	865.402.330	89		
						Diseminasi Informasi Daerah	139.225.000	136.982.330	98		
						Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	837.004.000	728.420.000	87		
						Program Pelayanan pengaduan Masyarakat	442.720.000	316.371.122	71		
						Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	0	0	0		
						Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK	433.230.000	316.371.122	73		
											16,10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Monitoring Isu Publik	9.490.000	0	0		
						Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	0	0	0		
						Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	0	0	0		
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	6.750.000	5.733.000	85		
						Pengelolaan system keamanan informasi Pemerintah Kota	6.750.000	5.733.000	85		
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	899.133.400	748.596.047	83		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000.000	478.000	24		
						Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	55.864.000	42.727.288	76		
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.000.000	5.591.100	25		
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.900.000	32.795.000	97		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.700.900	31.684.400	99.9		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.787.500	99.3		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Penyediaan Makanan dan Minuman	47.730.000	41.677.000	87		
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	336.358.500	329.329.153	98		
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	339.580.000	234.526.606	69		
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	275.550.000	219.762.450	80		
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.000.000	67.650.000	97		
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.550.000	17.550.000	100		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	188.000.000	134.562.450	72		
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0		
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0	0		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Bimbingan Teknis Aparatur	0	0	0		
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	95%	98%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.956.590.000	3.778.216.050	95		
						Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0		
						Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	113.750.000	110.416.400	97		
						Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	717.450.000	597.330.250	83		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Sewa Bandwidth Internet	1.940.000.000	1.933.480.000	100		
						Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	231.185.000	228.421.400	99		
						Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	954.205.000	908.568.000	95		
Rata-rata Capaian Kinerja											
Total Belanja Langsung							6.669.689.900	6.041.908.328			
Rata-rata Capaian Anggaran											

Capaian kinerja pada capaian tahun 2020 dimana realisasi anggaran sebesar 90% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 100% menunjukkan adanya efektifitas kinerja dan effiseinsi penggunaan anggaran sebesar 90%.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian/penyerapan penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informaika Kota Balikpapan. yang diukur atas APBD Dinas Komunikasi and Informatika Kota Balikpapan Tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun yang sama. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2020 (setelah perubahan/pergeseran), maka realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Menara telekomunikasi	694.690.000	903.575.376,00	76,88% (naik)
Belanja	12.599.035.611,00	9.948.250.408,00	78,96% (turun) 21.04

Total Target Tahun 2020 : Pendapatan Retribusi daerah adalah sebesar Rp 687.516.000,00 dan realisasinya adalah sebesar Rp 903.575.376,00 sedangkan total anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam bentuk APBD Murni adalah sebesar Rp

13.453.617.500,00 / (11.087.250.900,00 DPPA) ,- dan realisasi anggarannya mencapai Rp 9.948.250.408,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90%, maka dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 1.139.000.429,00,- ,hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran dan Refocusing

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebesar Rp 13.453.617.500,00/(11.087.250.900,00 DPPA) yang terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2020 sebesar Rp 4.417.561.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.906.342.080,00 (88 %).
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.669.689.900,00,- dengan realisasi sebesar Rp 6.041.908.328,00,- (91%) yang terbagi atas :

1) Anggaran pelaksanaan program sebagai berikut yaitu adalah :

- Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Tehnologi Informasi
- Program kerjasama informasi dan media massa
- Program pelayanan pengaduan masyarakat
- Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran ke 9 (sembilan) program ini sebesar Rp 2.713.099.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.263.692.278,00 atau (83%).

2) Anggaran pelaksanaan 1 (satu) program Urusan adalah :

- yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran II sebesar Rp 3.956.590.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.778.216.050,00 atau 95%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.6

Tabel perbandingan target dan realisasi APBD TA.2020 Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil nilai Kepuasan Masyarakat	77.5	86.56	112%	Jumlah Indikator I			
						Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Tehnologi Informasi	112.717.500	107.827.329	96
						Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	112.717.500	107.827.329	96
						Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	976.229.000	865.402.330	89
						Diseminasi Informasi Daerah	139.225.000	136.982.330	98
						Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	837.004.000	728.420.000	87
						Program Pelayanan pengaduan Masyarakat	442.720.000	316.371.122	71
						Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	0	0	0
						Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK	433.230.000	316.371.122	73
						Monitoring Isu Publik	9.490.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	ProgramKegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	0	0	0
						Penyusunan dan Pengumpulan Data dan StatistikDaerah	0	0	0
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	6.750.000	5.733.000	85
						Pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah kota	6.750.000	5.733.000	85
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	899.133.400	748.596.047	83
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000.000	478.000	24
						Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	55.864.000	42.727.288	76
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.000.000	5.591.100	25
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.900.000	32.795.000	97
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.700.900	31.684.400	99.9
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.787.500	99.3
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	336.358.500	329.329.153	98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	ProgramKegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	339.580.000	234.526.606	69
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	275.550.000	219.762.450	80
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70.000.000	67.650.000	97
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.550.000	17.550.000	100
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	188.000.000	134.562.450	72
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0	0
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
						Bimbingan Teknis Aparatur	0	0	0
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem	Persentase pemanfaatan SPBE atau e	98%	98%	100%	Jumlah Indikator II			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)				
			Target	Realisasi	% Capaian per Sasaran	ProgramKegiatan	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	government pada perangkat daerah				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.956.590.000	3.778.216.050	95	
						Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	
							Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	113.750.000	110.416.400	97
							Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	717.450.000	597.330.250	83
							Sewa Bandwidth Internet	1.940.000.000	1.933.480.000	100
							Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	231.185.000	228.421.400	99
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	954.205.000	908.568.000	95
Total Belanja Langsung							6.669.689.900	6.041.908.328		

3.3 Capaian Prestasi dan penghargaan

Selama tahun 2020, Dinas komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 2 penghargaan dari lembaga pemerintah. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.7

**Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2020**

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Terbaik III Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi Kaltim	Provinsi
2	Terbaik I Mitra Bakti Husada	Nasional	Kementerian Kesehatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2017 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya.

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

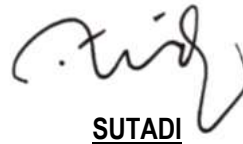
1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan

4. Meningkatkan dan menambah SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Balikpapan
5. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang informasi komunikasi dan publikasi
6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Komunikasi dan Informatika. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya, Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, dan berkelanjutan menuju madinatul iman.

Balikpapan, 31 Maret 2021

KEPALA DINAS



SUTADI